

EVALUASI PROGRAM BERSAMA LINDUNGI ANAK DARI KEKERASAN

EVALUATION OF JOINT PROGRAM PROTECT CHILDREN FROM VIOLENCE

Dwi Nur Hidayati, Lukman Arif*

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya

*Koresponden email: lukman_arif.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRAK

Kabupaten Sidoarjo memiliki tingkat korban kekerasan terhadap anak tertinggi kedua se-Provinsi Jawa Timur, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara evaluatif bagaimana pelaksanaan program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dalam mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan menurut Wiliiam N. Dunn yang terdiri dari enam kriteria yakni Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program BERLIAN belum sepenuhnya berjalan dengan optimal karena belum memenuhi kriteria dalam hal efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan perataan. Hal ini disebabkan karena kegiatan sosialisasi hanya dilakukan secara langsung tanpa dukungan media sosial dan DP3AKB Kabupaten Sidoarjo belum melakukan sosialisasi BERLIAN ke seluruh sekolah di Kabupaten Sidoarjo karena anggaran yang terbatas. Meskipun demikian, dalam kriteria responsivitas dan ketepatan menunjukkan bahwa program BERLIAN sudah tepat sasaran dan rata-rata responsivitas guru dan peserta didik merasa puas dan memberikan antusiasme yang tinggi. Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat berimplikasi pada perbaikan program Bersama Lindungi Anak di masa yang akan datang.

Kata kunci: Evaluasi kebijakan; kekerasan anak; Program Bersama Lindungi Anak.

ABSTRACT

Sidoarjo Regency has the second highest rate of victims of violence against children in East Java Province, so this research aims to analyze evaluatively how the BERLIAN (Together Protect Children) program is implemented in preventing and reducing the rate of violence against children in Sidoarjo Regency. This research uses a qualitative descriptive approach with primary and secondary data sources. Data collection methods used were observation, interviews and documentation. Then, data analysis techniques use data collection, data condensation, data presentation, and drawing conclusions. This research uses policy evaluation theory according to William N. Dunn which consists of six criteria, namely Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Alignment, Responsiveness and Accuracy. The results of this research indicate that the implementation of the BERLIAN program has not fully run optimally because it has not met the criteria in terms of effectiveness, efficiency, adequacy and distribution. This is because socialization activities are only carried out directly without the support of social media and the Sidoarjo Regency DP3AKB has not yet carried out BERLIAN socialization to all schools in Sidoarjo Regency due to limited budget. However, the responsiveness and accuracy criteria show that the BERLIAN program is right on target and the average responsiveness of teachers and students is satisfied and provides high enthusiasm. It is hoped that the results of this research will have implications for improving the Joint Protect Children program in the future.

Keywords: Policy evaluation; child violence; Joint Protect Children Program

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia masih cukup tinggi. Data menunjukkan peningkatan setiap tahunnya terkait dengan kekerasan anak di Indonesia. Pada tahun 2019, tercatat 11.057 korban kekerasan terhadap anak. Mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebanyak 221 menjadi 11.278, dan jumlah ini mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun pada tahun 2021 sebanyak 14.517. Terjadi peningkatan berikutnya pada tahun 2022 sebanyak 16.106 korban kekerasan terhadap anak. Dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 18.175 korban kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa kekerasan pada anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Meskipun anak-anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan yang perlu dididik, dijaga, dan dilindungi, namun anak-anak sering menjadi korban kekerasan.

Seperti yang dinyatakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Said et al., (2022) terdapat beberapa jenis kekerasan terhadap anak, yakni: kekerasan psikis yaitu melalui kata-kata kasar terhadap anak, pelecehan seksual mengacu pada perilaku seksual yang tidak pantas, penelantaran dan pengabaian yakni mengacu pada pengabaian terhadap kebutuhan dan hak anak, dan kekerasan ekonomi (*eksploitasi*) kemudian terjadi ketika orang dewasa secara paksa mengeksploitasi anak-anak demi keuntungan mereka sendiri.



Gambar 1. Jumlah Korban Kekerasan Anak per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Gambar 1 menunjukkan data jumlah korban kekerasan anak ditinjau per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2023, Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu daerah di Jawa Timur yang berkontribusi dalam menyumbang tingginya angka kekerasan anak di Jawa Timur. Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat kedua dengan jumlah korban kekerasan anak sebanyak 137 orang. Kota Surabaya menempati posisi pertama dengan 160 korban kekerasan anak, sedangkan Kabupaten Gresik menempati posisi ketiga dengan 118 korban kekerasan anak. Kabupaten Malang menempati posisi keempat dengan 100 korban kekerasan anak pada tahun 2023, dan Kabupaten Jember menempati posisi kelima dengan 97 korban kekerasan anak. Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam wilayah Gerbangkertosusila dan merupakan salah satu penyanga utama Kota Surabaya. Terlepas dari fakta bahwa Kabupaten Sidoarjo bukanlah kota besar seperti Kota Surabaya, namun Kabupaten Sidoarjo juga memiliki banyak masalah yang rumit, seperti kasus kekerasan pada anak.



Gambar 2. Jumlah Korban Kekerasan Anak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023

Gambar 2 diagram jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023 di atas, bahwa jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo relatif tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, terdapat 46 orang yang menjadi korban kekerasan terhadap anak. Dan meningkat drastis pada tahun 2020 menjadi 75 anak. Tahun berikutnya 2021, angka ini terus meningkat menjadi 91 anak, tahun 2022 terjadi penambahan kasus yang menambah total korban menjadi 92 anak. Dan peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2023 sebanyak 137 korban kekerasan anak.

Menyikapi tingginya angka kekerasan terhadap anak, Pemerintah harus mengambil tindakan untuk mencegah anak-anak menjadi korban kekerasan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin bahwa seluruh warga negara, termasuk anak-anak, bebas dari perlakuan tidak adil. Sehingga pemerintah harus mengambil tindakan yang paling efektif, paling menyeluruh, responsif, dan paling tepat untuk memastikan bahwa kekerasan terhadap anak akan berhenti. Salah satu bentuk upaya pemerintah untuk meminimalisir kejahatan anak adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Semua aspek upaya perlindungan anak, termasuk hak dan kewajiban anak, diatur oleh undang-undang ini. Jadi, pemerintah Indonesia melakukan banyak hal untuk menjaga semua anak dan mengurangi kekerasan terhadap anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meluncurkan program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) sebagai upaya untuk mengurangi kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia.

Sebagai salah satu Pemerintah Daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo memiliki kewenangan untuk menjalankan perannya dalam pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, mulai menerapkan program BERLIAN disebabkan oleh tingginya tingkat kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Program BERLIAN menjadi salah satu upaya DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dalam mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Program BERLIAN berfokus pada kegiatan perlindungan kekerasan anak di tingkat sekolah.

Secara konseptual, pelaksanaan program BERLIAN yang dilaksanakan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo mengacu pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Implementasi dari program BERLIAN yang dijalankan oleh DP3AKB Kabupaten Si-

doarjo adalah dalam bentuk sosialisasi kampanye di lingkungan sekolah wilayah Kabupaten Sidoarjo, termasuk SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta, dan SMA/SMK Negeri/Swasta. Komunikasi yang terjalin antara DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dengan pihak sekolah setelah adanya sosialisasi dan edukasi program BERLIAN, dibentuk melalui *MoU* antara kedua belah pihak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo telah menerapkan program preventif untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo melalui Program BERLIAN. Namun, berdasarkan adanya sejumlah fakta empiris bahwa tingkat kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo masih tinggi. Serta hasil temuan peneliti di lapangan bahwa implementasi Program BERLIAN belum berjalan secara efektif dan maksimal.

Peneliti tertarik untuk meneliti tentang evaluasi program BERLIAN. Sebagaimana dijelaskan oleh (Winarno, 2014), evaluasi adalah tahap terakhir dari proses kebijakan. Ini adalah tindakan fungsional yang dilakukan di semua tahap proses kebijakan publik, mulai dari perumusan masalah dan program untuk menyelesaikannya hingga implementasi dan dampak kebijakan. Sebagian pendapat, dikemukakan oleh Chronbach dan Stufflebeam dalam (Hasmin et al., 2017) bahwa proses evaluasi membantu membuat keputusan, bukan hanya mengukur seberapa jauh tujuan tercapai. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui hasil dan perkembangan serta membandingkan pengaruh program.

METODE

Pada penelitian ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh menggambarkan hasil penelitian secara mendalam dalam bentuk tulisan naratif, baik dalam bentuk kata maupun gambar, sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan (L. J. Moeloeng, 2021). Dengan sumber data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data digunakan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer penelitian ini diperoleh dari informan hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) adalah sebagai berikut : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Kepala Seksi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, Pendamping Hukum UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo yang ditugaskan dalam program BERLIAN, 3 Pihak Sekolah di Wilayah Satuan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang terlibat dalam program BERLIAN,

dan 3 Peserta Didik di Wilayah Satuan Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang terlibat dalam program BERLIAN. Kemudian, Teknik analisis data menggunakan Model Interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, & Saldana (2014), yakni Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian Data, Penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data dilakukan peneliti untuk membuktikan kesungguhan dan kebenaran hasil data yang diperoleh sesuai dengan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, peneliti memilih teknik keabsahan data tersebut sebagai uji validitas penelitian yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti menggunakan teori evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Wiliam N. Dunn (2003) yang menggambarkan kriteria evaluasi kebijakan yang meliputi 6 (enam) kriteria yaitu: efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Berikut secara rinci dari setiap kriteria evaluasi yang dikemukakan oleh Wiliam N. Dunn (2003).

Efektivitas

Efektivitas berkaitan dengan upaya yang dilakukan dan hasil yang diharapkan, seperti halnya apakah keinginan pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang bertujuan sebagai bentuk penyelesaian masalah kekerasan anak yang berada di lingkungan masyarakat dapat teratasi dengan maksimal. Dalam hal ini efektivitas dari program BERLIAN dapat dikatakan efektif jika mencapai tujuan yang telah diinginkan sebelumnya. Untuk melihat tingkat keefektifan dari pelaksanaan program BERLIAN dapat diketahui dari dua sasaran kajian yakni tujuan program dan sosialisasi program. Secara keseluruhan dari semua sasaran kajian pada kriteria efektivitas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program BERLIAN bahwa belum maksimal mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program BERLIAN belum tercapai. Sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan kriteria efektivitas yang disampaikan oleh Dunn (2003) bahwa efektivitas yakni kemampuan suatu tindakan atau alternatif dalam mencapai hasil yang diinginkan atau tujuan yang ditetapkan.

Pada sasaran kajian tujuan program menunjukkan bahwa tujuan dari program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) untuk mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo yang diimplementasikan terhadap lingkungan sekolah dan untuk membangun sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah belum tercapai. Sehingga pada aspek tujuan program dapat disimpulkan belum berjalan secara efektif. Fakta terlihat, dimana setelah adanya program BERLIAN dimulai, angka kekerasan anak di Ka-

bupaten Sidoarjo mengalami kenaikan setiap tahunnya layaknya gunung es, yang didukung dengan data rekap jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2023 pada Gambar 3 dibawah ini.



Gambar 3. Jumlah Korban kekerasan Anak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2023

Hal ini menunjukkan bahwa program BERLIAN di Kabupaten Sidoarjo belum secara efektif dalam mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak serta program harus dievaluasi dan ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi anak-anak. Pernyataan ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh (Dipta & Yuningsih, 2019) bahwa untuk mengetahui seberapa efektif suatu rencana adalah untuk membandingkan hasil yang dicapai dengan rencana tersebut. Akan tetapi, rencana tersebut dianggap tidak efektif jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan pencapaian tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai.

Kedua, pada sasaran kajian sosialisasi program menunjukan bahwa pelaksanaan sosialisasi program BERLIAN yang dilakukan oleh DP3AKB Kabupaten Sidoarjo hanya dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan berkunjung ke sekolah-sekolah dari tingkat SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta, dan SMA baik Negeri/Swasta yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan media pendukung berupa banner. Tidak adanya sosialisasi di media sosial yang dilakukan oleh pihak DP3AKB Kabupaten Sidoarjo, menjadikan informasi yang disampaikan hanya didapatkan oleh sekolah yang sudah disosialisasikan saja, tidak semua sekolah di Kabupaten Sidoarjo, peserta didik, dan guru merata mendapatkan informasi mengenai adanya program BERLIAN tersebut, sehingga dapat menyebabkan pemicu terjadinya kekerasan terhadap anak. Selaras dengan dengan pernyataan Nugroho dalam (Wahyudi & Ilham, 2021) bahwa penggunaan media sosial dalam bidang pelayanan publik pada level masyarakat masih belum optimal. Hal ini juga sejalan dengan belum dioptimalnya pengadopsian platform ini oleh pemerintah dalam memperbaiki reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Pada era sekarang ini hampir setiap orang memiliki gadget dan cara terbaik untuk menyebarkan informasi tentang keberadaan program BERLIAN adalah melalui sosial media.

Efisiensi

Efisiensi berhubungan dengan penilaian berdasarkan besar usaha yang dibutuhkan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dalam artian semakin sedikit sumber daya yang diinginkan, maka semakin efisien pelaksanaan suatu program atau kebijakan. Menurut Dunn (2003) efisiensi berkenaan sejauh mana usaha yang diinginkan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Selain itu, Dunn berpendapat bahwa kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efesiensi. Dalam hal ini berkaitan dengan besarnya usaha untuk mencapai keberhasilan diadakannya program BERLIAN dalam mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo. Dengan sasaran kajian sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Secara keseluruhan, darisemua sasaran penelitian yang berkaitan dengan kriteria efisiensi, dapat disimpulkan bahwa program BERLIAN belum berjalan secara efektif.

Pada sasaran kajian sumber daya manusia, menunjukan bahwa sumber daya manusia sudah mencukupi dan sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, yang terdiri dari semua anggota bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3AKB sebanyak 15 orang ditambah dengan kerjasama antara DP3AKB dan instansi lain sebagai narasumber, seperti dari UPTD PPA, BNN, Unit PPA Polres, Anggota DPRD, Ketua Komisi A DPRD, Dosen Universitas Trunojoyo Bangkalan, Ceo Permata Academy, dan Dinas Kominfo. Pernyataan ini sejalan dengan indikator kompetensi SDM yang diusulkan oleh Hutapea dan Nurianna Thoha dalam (Yuningsih dan Ardianti, 2019) yaitu dengan kata lain, memiliki pemahaman dan pengetahuan yang relevan dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan sosialisasi BERLIAN yang dilakukan secara langsung (tatap muka) tidak adanya sosialisasi di media sosial menjadi kendala. Hal ini tentu membutuhkan banyaknya usaha dari DP3AKB Kabupaten Sidoarjo dan OPD-OPD lain yang terlibat sebagai narasumber. Akan lebih efisien jika dalam pelaksanaan sosialisasi juga dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti platform instagram dinas, website dinas, dan youtube dinas sehingga informasi bisa merata didapatkan oleh semua pihak. Pandangan peneliti diperkuat dengan berdasarkan pada teori komunikasi menurut Everett dalam (Nurudin, 2016) relevan untuk mendukung pandangan tersebut, karena efisiensi dalam komunikasi dan transfer pengetahuan menjadi faktor penting dalam mencapai tujuan program BERLIAN.

Selanjutnya, menurut (Mahmudin, 2019) efisiensi berkaitan dengan penggunaan anggaran minimal untuk melaksanakan program secara

maksimal. Namun hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kriteria efisiensi pada aspek sumber daya anggaran tidak mencukupi. Aspek sumber daya anggaran program BERLIAN berasal dari Pokok Pikir (POKIR) yang merupakan inisiatif dari DPRD dan APBD Kabupaten Sidoarjo. Penyebab kurangnya anggaran tersebut karena dipaku oleh tim anggaran BAPPEDA. Sehingga pelaksanaan sosialisasi BERLIAN tidak bisa merata ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ditambah dengan pernyataan bahwa tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan program BERLIAN pada tahun 2023, sehingga menambah hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi yang tidak merata tersebut. Setiawan dalam (Bhirawa, 2022) mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidoarjo sangat memprihatinkan dan seolah-olah program pembangunan tidak diprioritaskan. Menurut (Mahmudin, 2019) bahwa anggaran adalah alat penting untuk manajemen karena membantu mereka merencanakan, mengatur, dan mengevaluasi tindakan.

Kecukupan

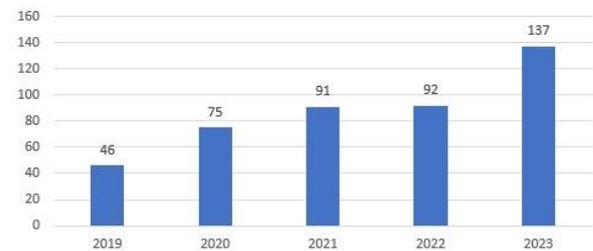
Sebuah kebijakan dikatakan memenuhi kriteria kecukupan jika hasil atau dampak dari kebijakan tersebut dapat mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat. Dalam hal ini berkaitan dengan seberapa besar program BERLIAN mampu mengatasi permasalahan kekerasan anak yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Dengan sasaran kajian hasil atau dampak dari program BERLIAN dalam memecahkan permasalahan kekerasan anak yakni dalam hal mencegah dan menekan angka kekerasan pada anak di Kabupaten Sidoarjo.

Berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa program BERLIAN belum sepenuhnya berhasil mengatasi permasalahan kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dunn (2003) yakni kecukupan berkaitan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang meningkatkan adanya permasalahan. Pernyataan ini didukung dengan data rekap jumlah korban kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo dari tahun 2019-2023 yang menunjukkan bahwa semakin tingginya angka kekerasan anak di Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya.

Meskipun program BERLIAN cukup membantu dalam mencegah kekerasan anak di lingkungan sekolah yang sudah di sosialisasikan. Namun, hasil atau dampak dari adanya program BERLIAN tidak bisa dirasakan oleh semua pihak karena belum meratanya pelaksanaan sosialisasi BERLIAN ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Selaras atas pernyataan oleh Sumah

et al. (2020), untuk melengkapi seluruh kelompok sasaran, diperlukan kecukupan implementator baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena implementasi yang lamban akan menyebabkan kebijakan menjadi kurang dinamis dan lambat.

Jumlah Korban Kekerasan Anak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023



Gambar 4. Jumlah Korban Kekerasan Anak di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019-2023.

Perataan

Kriteria perataan untuk kebijakan atau program tersebut diterapkan secara merata dan memenuhi semua kebutuhan. Dalam hal ini berkaitan dengan proses distribusi dalam bentuk sosialisasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Sidoarjo kepada sasaran program BERLIAN. Program BERLIAN dapat dikatakan merata apabila kondisi dilapangan menunjukkan sosialisasi yang dilakukan telah merata ke seluruh sekolah di Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BERLIAN belum didistribusikan secara merata ke seluruh sekolah di Kabupaten Sidoarjo. Terlebih berdasarkan pernyataan dari peserta atau penerima program BERLIAN, bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan juga belum merata untuk keseluruhan siswa, hanya diambil perwakilan siswa yang dapat ikut sosialisasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor hambatan, yakni kurangnya anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi BERLIAN sehingga tidak semua sekolah dan siswa-siswi terjangkau adanya program BERLIAN. Hambatan selanjutnya karena banyaknya sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Keadilan Distributif (*Distributive Justice Theory*) adalah John Rawls dalam (Fattah, 2013) yang menekankan bahwa pembagian yang adil adalah penting untuk mencapai keadilan sosial dan mengurangi ketimpangan yang tidak adil di antara individu atau kelompok masyarakat. Pandangannya dapat memberikan wawasan tentang pentingnya distribusi yang adil dalam pelaksanaan sosialisasi BERLIAN (Bersama Lindungi Anak).

Responsivitas

Responsivitas menurut Dunn (2003) berkenaan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai-nilai

kelompok tertentu. Kriteria responsivitas ini lebih kepada aspek kepuasan guru dan peserta didik khususnya kelompok sasaran atas hasil kebijakan. Hal ini mengacu apakah hasil dari suatu kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok sasaran program atau tidak. Dari kriteria responsivitas terdapat beberapa sasaran kajian yang dibagi menjadi dua aspek yaitu pemahaman sasaran program yakni guru dan peserta didik terhadap pelaksanaan program BERLIAN dan tanggapan berupa kepuasan sasaran program terhadap program BERLIAN. Secara keseluruhan dari semua sasaran kajian pada kriteria responsivitas yaitu rata-rata guru dan murid merasa puas dan memberikan antusiasme yang tinggi, sehingga materi sosialisasi mudah difahami. Namun, masih terdapat beberapa kurangnya kepuasan terhadap pelaksanaan program BERLIAN, karena kurang meratanya semua kelas dan murid yang mendapatkan sosialisasi. Sehingga diharapkan semua murid merata bisa mendapatkan sosialisasi BERLIAN, dan pelaksanaan BERLIAN akan berjalan secara maksimal.

Pertama, berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilakukan pada pelaksanaan program BERLIAN, menunjukkan bahwa pihak DP3AKB dalam melakukan sosialisasi BERLIAN yang dilakukan secara langsung, memberikan antusiasme yang tinggi dari guru dan murid. Sehingga materi sosialisasi mudah difahami. Edukasi tentang kekerasan perlu diinternalisasi dalam kurikulum sekolah, agar pengetahuan tidak hanya berhenti pada saat sosialisasi mengingat dalam penerapan program BERLIAN yang dilakukan bersama dengan instansi sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh Waterman et al., (2021) bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada siswa dengan memasukkan pendidikan anti kekerasan pada kurikulum sekolah dan kampanye sosial.

Kedua, berdasarkan temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa rata-rata penerima sasaran program yakni guru dan peserta didik merasa puas dengan adanya program BERLIAN. Karena sistem perlindungan anak terbentuk di sekolah dan dapat mengetahui cara melapor jika terjadi kekerasan di sekolah. Guru dan peserta didik sebagai peserta program BERLIAN menyatakan bahwa program BERLIAN memberikan manfaat yang positif bagi sekolah. Hal ini didukung teori kepuasan konsumen yang dikemukakan oleh Philip Kotler dalam (Muhtadi & Indah Choirunnisa, 2019). Teori tersebut mengungkapkan bahwa kepuasan konsumen dapat diukur melalui ungkapan langsung kepuasan, penilaian terhadap atribut yang dirasakan, dan analisis masalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta program BERLIAN merasa puas dengan adanya program tersebut. Namun, karena kurangnya keterlibatan

kelas dan murid dalam sosialisasi serta kebutuhan media sosial, ada sedikit ketidakpuasan dalam pelaksanaan program. Dengan mengetahui hal ini, pemerintah dapat terus meningkatkan pelaksanaan program BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) untuk meningkatkan kepuasan peserta.

Ketepatan

Menurut Dunn (2003) ketepatan yaitu hasil yang telah dicapai benar-benar berguna khususnya bagi kelompok sasaran. Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang kebergunaan hasil kebijakan, yaitu apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi kelompok sasaran program. Adapun sasaran kajian terkait kriteria ketepatan yakni ketepatan sasaran program BERLIAN yang telah ditetapkan sebelumnya dan hasil yang dicapai dalam program BERLIAN bermanfaat atau bernilai bagi guru dan peserta didik. Secara keseluruhan dari semua sasaran kajian pada kriteria ketepatan dapat disimpulkan bahwa sasaran program BERLIAN sudah tepat sasaran. Serta program BERLIAN memberikan manfaat bagi sasaran program yakni peserta didik dan guru. Namun alangkah baiknya sosialisasi tersebut merata sehingga kebermanfaat bisa dirasakan oleh semua pihak. Maka perlu adanya evaluasi yang cermat dan perbaikan dalam pelaksanaan sosialisasi program BERLIAN agar kedepannya bisa berjalan dengan maksimal.

Pada hasil penelitian kriteria ketepatan target program bahwa target program BERLIAN sudah tepat sasaran yakni peserta didik dan guru di sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo dari mulai SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta, dan SMA Negeri/Swasta yang terlibat dalam program BERLIAN. Pelaksanaan program BERLIAN berpendapat bahwa program ini sudah mengenai sasaran yang tepat karena diberikan kepada kelompok sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh (Budiani & Ni Wayan, 2007), yang menyatakan bahwa ketepatan sasaran program dilihat dari sejauh mana peserta program sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Kedua, berdasarkan temuan hasil penelitian pada pelaksanaan program BERLIAN bahwa memberikan manfaat bagi sasaran program yakni peserta didik dan guru. Mereka jadi mengetahui bagaimana cara melapor jika terjadi kekerasan anak. Dengan adanya MoU antara pihak sekolah dengan DP3AKB dapat terjalin koordinasi jika terjadi kekerasan. Serta dapat membentuk sistem perlindungan sekolah sehingga menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswi. Meskipun sosialisasi BERLIAN ini hanya perwakilan saja yang ikut serta, harapan kedepannya bisa merata semua guru dan murid ikut dalam sosialisasi sehingga kebermanfaat bisa dirasakan oleh semua pihak.

KESIMPULAN

Kriteria efektivitas bahwa pelaksanaan program BERLIAN belum berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat efektivitas program BERLIAN belum tercapai. Kriteria efisiensi bahwa pelaksanaan program BERLIAN di Kabupaten Sidoarjo belum mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan secara keseluruhan pada kriteria efisiensi bahwa dalam pelaksanaan program BERLIAN belum berjalan secara efisien. Kriteria kecukupan bahwa program BERLIAN belum sepenuhnya berhasil mengatasi permasalahan kekerasan anak. Kriteria perataan bahwa pelaksanaan program BERLIAN belum mencapai tujuan perataan yang diharapkan. Kriteria reesponsivitas bahwa rata-rata guru dan murid merasa puas dan memberikan antusiasme yang tinggi, sehingga materi sosialisasi mudah difahami. Kriteria ketepatan bahwa sasaran program BERLIAN sudah tepat sasaran. Serta program BERLIAN memberikan manfaat bagi sasaran program yakni peserta didik dan guru. Maka perlu adanya evaluasi yang cermat dan perbaikan dalam pelaksanaan sosialisasi program BERLIAN agar kedepannya bisa berjalan dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, I. S., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Evaluasi Pelaksanaan Program Raskin Dikelurahan Maharatu Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Bastian, M. A., & Tukiman. (2022). Implementation of Joint Program Protect Children in The Protection of Child Victims of Violence at The Women ' s Empowerment Service of Child Protection and Family Planning, Sidoarjo Regency. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(4), 482–494.
- Budiani, N. W. (2017). Efektivitas Program Penanggulangan Pengangguran Karang Taruna “Eka Taruna Bhakti” Desa Sumerta Kelod Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar. *Jurnal Ekonomi Dan Sosial (INPUT)*, 2(1), 49–57.
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.).
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 16(1), 66–76.
- Faradisa, R., Rostyaningsih, D., & Lituhayu, D. (2018). Evaluasi Program Penanganan Anak Jalanan Oleh Dinas Sosial dan Olahraga Kota Semarang Melalui Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pelangi. *Indonesian Journal of Public and Management Review*, 4(3).
- Fattah, D. (2013). Teori Keadilan Menurut John Rawls. *JURNAL TAPIS : Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45.
- Ilham, A. R., & Andri, S. (2020). Evaluasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS). *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(2), 89-96.
- Khairullah, M. R., & Zulkarnaini, Z. (2017). *Evaluasi peraturan daerah nomor 2 tahun 2013 tentang gerakan masyarakat maghrib mengaji di Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Moeloeng, L. J. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (L. J. (2021). M. P. K. Moeloeng (ed.)). Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.
- Muhtadi, M., & Choirunnisa, I. (2019). Implikasi Kualitas Pelayanan Program Keluarga Harapan terhadap Kepuasan Penerima Manfaat di Kelurahan Beji Depok. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 3(2), 397–424.
<https://doi.org/10.14421/jpm.2019.032-08>
- Mukhaiyarah, R., Darmawan, A., & Indartuti, E. (2024). Evaluasi Program Puspaga Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Anak Di DP3APPKB Surabaya (Studi Kasus Layanan Konseling). *Journal of Administrative and Social Science*, 5(1).
- Nurudin. (2016). *Ilmu Komunikasi: Ilmiah dan Populer*. In D. B. P. Tinggi (Ed.), Surabaya: Raja Grafindo Persada.
- Puspitasari, M., & Rodiyah, I. (2022). Keterlibatan Stakeholder dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Sidoarjo. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 8.
- Ramadhani, S. P., & Nurwati, N. (2022). Pentingnya Meningkatkan Kesadaran Orang Tua Agar Tidak Melakukan Tindak Kekerasan Terhadap Anak. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 4(2), 189–197.
<https://doi.org/10.24198/focus.v4i2.33729>
- Rohmah, P., & Lukman Arif. (2022). Evaluation of The Revitalization of Small Medium Industry Centers in Shopping Tourism in Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Publik Public Administration Journal*, 12(2), 137–150.
<https://doi.org/10.31289/jap.v12i2.6992>
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.
- Wahyudi, M. I., & Ilham, T. (2021). Media Sosial untuk Penguatan Fungsi Pelayanan. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 85–98.
<https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.1994>